

ABSTRAK

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis informasi penawaran, promosi dan iklan perumahan oleh pengembang PT Bintang Anugrah Propertindo ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen serta analisa mengenai tanggung jawab pengembang PT Bintang Anugrah Propertindo atas ketidak sesuaian informasi yang diberikan kepada Konsumen dengan kenyataanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif bersifat Preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, skunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan serta melakukan studi lapangan guna klarifikasi langsung pada Pihak pemasaran Pengembang PT Bintang Anugrah Propertindo dan konsumen perumahan. Hasil penelitian penulis menunjukan bahwa perlindungan hukum konsumen perumahan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan maksimal. Pemenuhan hak atas informasi bagi konsumen dirasa masih kurang, informasi yang diberikan pengembang belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini Nampak masih banyak adanya aduan dan complain konsumen terkait kerusakan fisik bangunan serta ketidakjelasan informasi pada tahap pra transaksi mengenai pembangunan sarana perumahan. Dalam hal ini konsumen mengalami kerugian, Pengembang PT Bintang Anugrah Propertindo telah bertanggung jawab sesuai dengan pasal 19 UUPK dengan memberikan ganti rugi dan perbaikan atas kerusakan fisik bangunan rumah.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen , Hak atas Informasi*

ABSTRACT

This legal writing aims to analyze information on housing offer, promotion and advertising by the PT Bintang Anugrah Propertindo Developer reviewed by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and an analysis of PT Bintang Anugrah Propertindo developer responsibilities for the incompatibility of information provided to consumers with its realization. This study is normative legal research that is prescriptive with a statute approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials with library research data collection techniques and conducting field studies to clarify directly with the PT Bintang Anugrah Propertindo Marketing developers and residential consumers. The result of this study indicates that the legal protection of consumer housing has not been fully implemented maximally. Fulfilment of the right to information for consumers is still lacking. The information provided by the Developer is not fully in accordance with the rules in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This is evident from the complains and complaints from consumers regarding the physical damage to buildings and the unclear information in the pre-transaction stage regarding the construction of housing facilities. In the event that the consumer experiences a loss, the Developer of Bintang Anugrah Propertindo has been responsible in accordance with article 19 of the UUPK by providing compensation and repairs to the physical damage to the house building

Keywords: Legal, Consumer Protection, Housing, Right to information